

# Isu Perubahan Iklim dalam *Global Governance*: Tantangan dan Efektivitas Kerja Sama Internasional

Organisasi Internasional dan Globalisasi, Jurusan Administrasi Negara, Universitas Lampung

<sup>1</sup>Wal Imron Jaya Kusuma  
2316041010

<sup>2</sup>Hanif Farhansyah  
2316041025

<sup>3</sup>Muhamad Rifki Macan  
2316041067

<sup>4</sup>Rizky Pratama Fadli  
2356041026

Dosen Pengampu:

Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.

## Abstrak

Perubahan iklim merupakan isu global yang berdampak luas terhadap keberlanjutan lingkungan dan kehidupan manusia modern. Meskipun berbagai mekanisme global governance telah dibentuk, efektivitasnya masih menghadapi tantangan struktural dan politis yang kompleks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dari jurnal, buku, dan laporan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran United Nations dan United Nations Framework Convention on Climate Change cukup signifikan dalam mengoordinasikan kerja sama global. Namun, implementasi kebijakan seperti Paris Agreement masih menghadapi hambatan akibat perbedaan kepentingan antarnegara. Dengan demikian, global governance memiliki peran penting, tetapi belum optimal dalam mengatasi perubahan iklim secara efektif.

**Kata kunci :** climate change, global governance, kebijakan internasional, perubahan iklim

## Abstract

Climate change constitutes a global issue that significantly affects environmental sustainability and human life worldwide. Despite the establishment of various global governance mechanisms, their effectiveness remains constrained by complex structural and political challenges. This study employs a qualitative descriptive approach through literature review of academic journals, books, and international reports. The findings indicate that the roles of the United Nations and the United Nations Framework Convention on Climate Change are essential in coordinating global cooperation. However, the implementation of policies such as the Paris Agreement still encounters obstacles due to differing national interests. Therefore, global governance plays a crucial role, yet remains suboptimal in effectively addressing climate change.

**Kata kunci :** climate change, global governance, international policy, environmental governance

## I. Pendahuluan

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang semakin mendesak dan berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan (Malau, 2024). Fenomena seperti peningkatan suhu global, intensitas bencana alam, serta perubahan pola cuaca menunjukkan eskalasi krisis lingkungan yang signifikan. Dalam kajian hubungan internasional, perubahan

iklim dikategorikan sebagai masalah lintas batas yang tidak dapat diselesaikan secara nasional semata (Vidia, 2024). Kondisi tersebut menegaskan bahwa diperlukan pendekatan kolektif yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai negara secara simultan.

Konsep *global governance* muncul sebagai respons terhadap kebutuhan

pengelolaan isu global melalui mekanisme kerja sama internasional yang terstruktur (Wijatmadja, 2023). Dalam konteks ini, United Nations berperan sebagai aktor utama yang memfasilitasi dialog dan koordinasi antarnegara. Selain itu, United Nations Framework Convention on *Climate Change* menyediakan kerangka institusional untuk merumuskan kebijakan iklim global secara sistematis (Aqilah, 2024). Keberadaan instrumen seperti Paris Agreement mencerminkan upaya kolektif dalam menekan laju perubahan iklim melalui komitmen bersama (Afifah et al., 2025).

Namun demikian, implementasi *global governance* dalam isu perubahan iklim masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Perbedaan kepentingan antara negara maju dan berkembang seringkali menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan yang adil. Selain itu, keterbatasan dalam penegakan komitmen internasional menyebabkan ketidaksesuaian antara target dan realisasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka kerja telah tersedia, efektivitasnya masih belum optimal dalam menjawab tantangan global yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini berupaya mengkaji bagaimana *global governance* berperan dalam mengatasi perubahan iklim serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk memahami sejauh mana efektivitas mekanisme internasional dalam merespons krisis lingkungan global. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian organisasi internasional dan globalisasi secara lebih komprehensif.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dinamika *global governance* dalam isu perubahan iklim. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu menjelaskan fenomena kompleks secara mendalam melalui interpretasi data konseptual. Dalam kajian

hubungan internasional, metode kualitatif sering digunakan untuk menganalisis interaksi aktor global secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap peran United Nations dalam mengoordinasikan kebijakan iklim global.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang bersumber dari jurnal akademik, buku ilmiah, serta laporan resmi internasional. Sumber data mencakup publikasi dari United Nations Framework Convention on *Climate Change* dan dokumen kebijakan seperti Paris Agreement. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif untuk memastikan validitas, relevansi, serta kredibilitas informasi yang digunakan. Dengan demikian, data yang diperoleh mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai isu perubahan iklim dalam konteks *global governance*.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif melalui proses reduksi, klasifikasi, dan interpretasi informasi yang telah dikumpulkan. Setiap data dianalisis berdasarkan keterkaitannya dengan konsep *global governance* dan implementasi kebijakan iklim internasional. Proses ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, serta kesenjangan antara teori dan praktik yang terjadi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menghasilkan analisis yang sistematis, argumentatif, dan relevan terhadap permasalahan yang dikaji.

## III. Hasil dan Pembahasan

### A. *Climate Change* sebagai Isu Global

Perubahan iklim merupakan isu global yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia modern. Dalam perspektif teori hubungan internasional, isu ini dikategorikan sebagai *global public problem* yang melampaui batas kedaulatan negara (Vidia, 2024). Dampak nyata seperti peningkatan suhu global, banjir ekstrem, serta kekeringan berkepanjangan telah terjadi di berbagai wilayah dunia (Ainurrohmah & Sudarti, 2022). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak dapat diselesaikan secara unilateral oleh satu

negara saja. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas negara yang terkoordinasi melalui mekanisme *global governance* yang efektif dan berkelanjutan.

## B. Peran Global Governance

Konsep *global governance* mengacu pada mekanisme kolektif yang melibatkan berbagai aktor dalam mengelola isu global secara bersama (Hidayat et al., 2024). Dalam konteks perubahan iklim, peran United Nations menjadi sangat penting sebagai fasilitator utama kerja sama internasional. Melalui berbagai forum dan kebijakan, organisasi ini berupaya mengkoordinasikan tindakan negara-negara dalam menghadapi krisis iklim. Selain itu, United Nations Framework Convention on *Climate Change* berfungsi sebagai kerangka kerja utama dalam perundingan dan implementasi kebijakan iklim global (Sihotang, 2025). Meskipun demikian, *efektivitas global governance* masih menghadapi keterbatasan akibat perbedaan kepentingan antarnegara yang seringkali menghambat konsensus.

## C. Implementasi Kebijakan Global

Salah satu bentuk konkret implementasi *global governance* dalam isu iklim adalah melalui Paris Agreement yang disepakati pada tahun 2015. Perjanjian ini menetapkan target global untuk menahan kenaikan suhu bumi di bawah dua derajat Celsius (Ayuningsih et al., 2023). Negara-negara peserta diwajibkan menyusun kontribusi nasional dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Beberapa negara telah menunjukkan komitmen melalui kebijakan energi terbarukan dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Namun demikian, realisasi di lapangan seringkali tidak sejalan dengan target yang telah disepakati, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen dan implementasi nyata.

## D. Tantangan dan Konflik

Dalam pelaksanaannya, *global governance* menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari konflik kepentingan antarnegara. Negara maju cenderung memiliki tanggung jawab historis yang lebih besar

terhadap emisi karbon global dibandingkan negara berkembang (Ardiyansyah, 2026). Namun, negara berkembang seringkali menanggung dampak perubahan iklim yang lebih signifikan meskipun kontribusi emisinya relatif kecil. Selain itu, kepentingan ekonomi nasional sering menjadi penghambat dalam pengambilan keputusan kolektif terkait kebijakan lingkungan. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam pembagian tanggung jawab yang memperlambat proses penyelesaian masalah secara global. Oleh karena itu, konflik ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas kerja sama internasional dalam isu iklim.

## E. Analisis Kritis Efektivitas

Efektivitas *global governance* dalam menangani perubahan iklim masih menjadi perdebatan dalam kajian akademik dan praktik internasional. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas permasalahan yang bersifat multidimensional. Keterbatasan dalam penegakan hukum internasional serta lemahnya sanksi terhadap pelanggaran menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja sistem ini. Namun demikian, keberadaan berbagai perjanjian internasional tetap memberikan kerangka dasar yang penting bagi koordinasi global. Dengan demikian, *global governance* dapat dikatakan belum optimal, tetapi tetap memiliki peran strategis dalam mendorong kerja sama lintas negara.

## F. Solusi dan Rekomendasi

Upaya peningkatan efektivitas *global governance* memerlukan komitmen yang lebih kuat dari seluruh negara, terutama dalam implementasi kebijakan yang telah disepakati. Selain itu, mekanisme pendanaan bagi negara berkembang perlu diperkuat agar mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Penegakan aturan internasional juga harus diperjelas dengan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran komitmen. Di sisi lain, kolaborasi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu ditingkatkan untuk menciptakan pendekatan yang lebih inklusif. Dengan

langkah tersebut, diharapkan tata kelola global dalam isu perubahan iklim dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan. *(Isi Hasil dan Pembahasan ditulis dengan Times new roman, ukuran 11, Spasi 1, justify)*

#### IV. Kesimpulan

Perubahan iklim merupakan isu global yang menuntut respons kolektif melalui mekanisme *global governance* yang terstruktur dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, peran United Nations dan United Nations Framework Convention on Climate Change menjadi krusial dalam mengoordinasikan kepentingan berbagai negara. Implementasi kebijakan seperti Paris Agreement menunjukkan adanya komitmen bersama, meskipun realisasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola global telah menyediakan kerangka kerja yang relevan, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi kompleksitas perubahan iklim secara menyeluruh.

Dengan demikian, *global governance* memiliki peran strategis sebagai instrumen koordinasi internasional, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh dinamika kepentingan politik dan ekonomi antarnegara. Ketimpangan tanggung jawab antara negara maju dan berkembang serta lemahnya mekanisme penegakan menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi kebijakan. Oleh karena itu, penguatan komitmen, peningkatan akuntabilitas, serta kolaborasi lintas aktor menjadi prasyarat penting untuk memperbaiki kinerja sistem ini. Kesimpulannya, meskipun belum optimal, *global governance* tetap menjadi fondasi utama dalam upaya kolektif menghadapi krisis iklim global.

#### V. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi kepada Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D., selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi Internasional dan Globalisasi. Bimbingan, arahan, serta masukan yang diberikan sangat membantu dalam penyusunan

paper ini secara sistematis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai sumber ilmiah yang telah mendukung analisis penelitian. Dukungan tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas kajian yang dihasilkan. Ucapan terima kasih kepada pihak sponsor maupun dukungan finansial juga dituliskan di bagian ini.

#### REFERENSI

- Afifah, F., Hadi, F., & Abadi, S. (2025). Implikasi Hasil CoP 30 Terhadap Komitmen Iklim Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Law and Humanity*, 3(3), 215–232. <https://doi.org/10.37504/lh.v3i3.771>
- Ainurrohmah, S., & Sudarti, S. (2022). Analisis Perubahan Iklim dan Global Warming yang Terjadi sebagai Fase Kritis. *Jurnal Phi Jurnal Pendidikan Fisika Dan Fisika Terapan*, 3(3), 1. <https://doi.org/10.22373/p-jpft.v3i3.13359>
- Aqilah, D. Z. (2024). Peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam menangani perdagangan gelap narkoba di Indonesia pada tahun 2021–2023. *Global Insight Journal : Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 01(01). <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/GIJ/article/view/2467>
- Ardiyansyah, F. (2026). Peran kewarganegaraan global dalam mendorong aksi kolektif terhadap perubahan iklim: studi kasus gerakan iklim internasional. *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, 3(1), 18–24. <https://humaniorasains.id/jhss/article/view/176>
- Ayuningsih, A. N., Oktaviani, M. A., Chandra, A., Athyah, N., Manda M., P. D., Citra, Z., & Sulaiman, S. D. (2023). Ratifikasi Paris Agreement Dan Pengaplikasian National Determined Contribution (Ndc) Indonesia. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 60–69. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.21859>
- Hidayat, I. F. H., Fatih, M. S., Safdar, S., & Ummah, A. (2024). Peran kewarganegaraan global dalam mendorong aksi kolektif terhadap perubahan iklim: studi kasus gerakan iklim internasional. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(1), 118–126. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i1.1626>
- Malau, V. O. (2024). Perkembangan Ekonomi Hijau sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim. *Circle Archive*, 1(5), 1–12. <https://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/231>
- Sihotang, F. M. P. (2025). Kontribusi Aktor Nonnegara terhadap Lingkungan Global dalam Perdagangan Karbon melalui Penerapan Sistem

- Registri Nasional-Pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia (SRN-PPI). *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, 7(2), 137–153. <https://doi.org/10.24198/padjirv7i2.62312>
- Vidia, S. P. R. (2024). Strategi Indonesia Dalam Mengatasi Perubahan Iklim Melalui Kerjasama Internasional. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 13(1), 24–35. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/id/article/view/4083>
- Wijatmadja, S. (2023). Glocal Governence di Abad XXI. *Jurnal Studi Interdisiplin Perspektif*, 22(2), 222–232. <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/117>